

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Mujadin, 2007, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Albert Hasibuan, 1997, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bambang Sugiono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Harun M. husein, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Edisi, I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Ajdji dan Rekan*, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung,.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung.
- M. Kardjadi dan R. Susilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentarm*, Politeia Bogor.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad Nur, 2022, *KPK Dalam Pusaran Pemberantasan TIPIKOR*, Yayasan PeNA, Banda Aceh.

Saldi Isra, 2009, *Kekuasaan dan Prilaku Korupsi*, Kompas Gramedia, Jakarta.

Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perpspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

WJS Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Repubik Indonesia, Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Repubik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Repubik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang

Repubik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Repubik Indonesia, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Repubik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal/ Skripsi/Internet

Andre G. Mawey, 2016, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V, No. 2.

Annisa, "Tindak Pidana: Pengertian, Unsur Dan Jenisnya", <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> Di Akses Pada Tanggal 27 Oktober 2024.

Azwarman dkk, 2021, "Analisis Yuridis Bentuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe)", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 2 Nomor 3.

- Barda Nawawi Arif, 1984, Sari Kuliah Hukum Pidana II, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Undip, Bandung.
- Frani, 2018, Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa, *Jurnal Al'Ad*, Volume IX Nomor 3.
- La Sina, 2008, Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26, No. 1
- Sandro Unas, 2019, "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Lex Et Societatis* Volume 7 Nomor 4
- Wicipto Setiadi, 2018, Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pembentukan, Serta Regulasi), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 3
- Yessy Paramita Samadi, 2015, "Kajian Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, Vol. IV No. 2
- Zulkarnaini, "Lima Terdakwa Perkara Korupsi Monumen Samudera Pasai Bebas, Kejaksaan Lakukan kasasi", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/16/lima-terdakwa-perkara-korupsi-monumen-samudera-pasai-bebas-kejaksaan-lakukan-kasasi>, Di Akses Pada 27 Oktober 2024, Pukul 20:00.